



UNMUL HEBAT,  
KALTIM BERDAULAT, **ika** KUAT:  
Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman  
di Usia 60 Tahun

**Volume 1**



UNMUL HEBAT,  
KALTIM BERDAULAT, **ika** KUAT:  
Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman  
di Usia 60 Tahun

**Volume 1**

Tim Penulis



Anggota IKAPI  
Gedung LP2M Universitas Mulawarman  
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua, Samarinda,  
Kalimantan Timur, Indonesia, 75119

C.01/12.2022

**Mulawarwan University Press**  
Anggota IKAPI  
Gedung LP2M Universitas Mulawarman  
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua, Samarinda,  
Kalimantan Timur, Indonesia, 75119  
E-mail: mup@unmul.ac.id

**Judul Buku:**

Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:  
Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun

**Penulis:**

Tim Penulis

**Editor:**

Mustofa Agung Sardjono  
Lambang Subagiyo  
Anton Rahmadi

**Penyunting Bahasa:**

Bayu Nugraha

**Desain Sampul & Penata Isi:**

Army Trihandi Putra

**Jumlah Halaman:**

514 + xxvi Halaman Romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan 1, Desember 2022

ISBN: 978-623-5262-49-9

Dicetak oleh:

**PT Penerbit IPB Press**

Anggota IKAPI  
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128  
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id  
www.ipbpress.com

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2023, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit

# PENGANTAR:

## Unmul sebagai Pilar Penting dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kaltim Guna Memperkuat Nusantara

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

*Rektor Universitas Mulawarman 2014/2018; 2018/2022*

*Alhamdulillah*, atas izin-Nya buku sebagai bentuk pemikiran konkret akademisi/peneliti Universitas Mulawarman (Unmul) ini dapat diselesaikan di usia perguruan tinggi kebanggaan Kaltim yang ke-60 tahun. Berisi 60 artikel semi ilmiah berbasiskan pada hasil dan pengalaman penelitian bertahun-tahun dari para penulis. Penulisan ini dimaksudkan guna memberikan *input* atau inspirasi, khususnya bagi para perumus dan pengambil kebijakan di tingkat daerah dan/atau pusat, terutama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu Kaltim Berdaulat dan Ibu Kota Negara (IKN; yang dinamakan Nusantara) yang Kuat.

Pengalaman panjang di negara mana pun di dunia telah membuktikan, baik perumusan kebijakan publik atau pun peraturan perundangan, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak terkecuali dalam kerangka pembangunan yang diterbitkan oleh Negara c.q. personifikasinya di tingkat pusat maupun daerah, bukan melulu berbasiskan pada isu/kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, apalagi persepsi di kalangan sendiri. Akan tetapi, penting guna menyerap aspirasi dan bahkan mempertimbangkan kritisasi yang diberikan oleh pihak lainnya.

Dalam posisi ini peran perguruan tinggi seperti Unmul menjadi signifikan bagi keberhasilan dalam rangka pengembangan konsepsi dan implementasinya, karena didasarkan telaahan pada aspek teoritik dan aspek empirik yang dikaji/diteliti secara objektif dan bahkan terukur.

Unmul yang dapat dikatakan merupakan pilar penting dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan memperkuat Nusantara sebagaimana digunakan sebagai judul dari pengantar buku ini, memiliki alasan yang kuat di samping apa yang diuraikan di atas. Pada usianya yang telah mencapai enam dasawarsa, memiliki sumber daya manusia dengan berbagai bidang keahlian yang pada dasarnya mencukupi untuk misi tersebut. Keunggulan komparatif yang dimiliki yang pada akhirnya dituangkan dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul, yaitu Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya (*Tropical Rain Forest and Its Environment*) menggarisbawahi pemahaman yang kuat atas penggalian data/informasi pembangunan wilayah yang ditempati, sekaligus bentuk tanggung jawab besar sebagai perguruan tinggi pada posisi terdekat (*front line*) dengan IKN Nusantara.

Saya selaku Rektor Unmul pada dua periode 2014/2018 dan 2018/2022 amatlah bersyukur dan berbahagia dapat memasuki usia Unmul ke-60 tahun menjelang berakhirnya periode kepemimpinan saya sekaligus bisa memberikan kontribusi yang diharapkan berarti dari lembaga dan bagi daerah yang saya cintai.

Oleh karenanya dalam kesempatan yang tepat ini ingin saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setulus hati kepada masyarakat dan mitra yang dapat saya bagi dalam tiga bagian besar:

1. Para kontributor atau penulis artikel, baik perorangan atau pun kelompok, dan tentu saja tim editor yang saya yakini telah bekerja keras guna mendukung terwujudnya buku ini dalam waktu yang relatif terbatas;
2. Seluruh civitas akademika Unmul, baik para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja bersama dalam rangka pembangunan Unmul selama ini, khususnya pada masa periode kepemimpinan saya;

## **Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:**

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

---

3. Para mitra Unmul dari berbagai kalangan, baik pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dunia usaha dan industri, serta tentu saja masyarakat luas yang merasa memiliki Unmul dan mendukung kemajuannya.

Pada akhirnya, menyadari berbagai kekurangan yang saya miliki, kesempatan baik ini juga disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga buku yang diberi judul “**Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat: Kontribusi Pemikiran Universitas di Usia 60 Tahun**” dapat memberikan manfaat langsung atau pun tidak langsung yang luas.

Samarinda, 27 September 2022

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
*Rektor Universitas Mulawarman 2014/2018; 2018/2022*





EDITORIAL:  
Perspektif Akademik Mewujudkan  
Kaltim Berdaulat dan IKN yang Kuat

*Mustofa Agung Sardjono<sup>1</sup>, Lambang Subagiyo<sup>2</sup>, Anton Rahmadi<sup>3</sup>*

**Pendahuluan: Peran dan Fungsi Unmul sebagai Perguruan Tinggi**

Universitas Mulawarman (Unmul) yang terbentuk tahun 1962 merupakan perguruan tinggi negeri yang pertama di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dalam arti jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah (baik Sekolah Menengah Pertama/SMP ataupun Sekolah Menengah Atas/SMA atau pendidikan menengah yang setara lainnya) yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan profesi, serta spesialis. Unmul saat ini, pada usia ke-60 tahun (2022) memiliki keseluruhan program pendidikan tersebut, terbagi pada 13 fakultas dan satu program pasca sarjana dengan total 96 program studi (prodi).

Sudah dikenal secara luas bahwa sebagai perguruan tinggi maka Unmul juga memiliki kewajiban untuk menjalankan Tridharma, yaitu dharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiganya dijalankan secara simultan dan terpadu. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menguraikan secara jelas makna dari Tridharma, sebagai berikut:

- (1) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

---

1 Wakil Rektor Bidang Akademik/Dosen Fakultas Kehutanan Unmul

2 Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)/Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)/Dosen Fakultas Pertanian

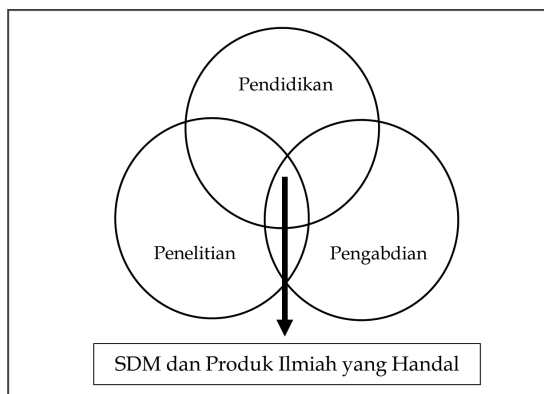
## Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

---

- (2) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah ilmiah, secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian;
- (3) **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan mencermati lebih lanjut dari perundangan tersebut pada fokus tugas tridharma, dapat juga dikemukakan peran penting Unmul sebagaimana perguruan tinggi lainnya sebagai agen perubah (*agent of change*) yang fungsi utamanya mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang andal seutuhnya, dalam arti berketuhanan, berkepribadian baik, berpengetahuan mumpuni (mendalam dan luas), serta berorientasi masa depan yang berperikemanusiaan. Daya saing bangsa dan negara ini guna menghadapi persaingan global yang secara faktual semakin ketat, menuntut juga peran dan fungsi perguruan tinggi tersebut harus semakin ditingkatkan kualitasnya dan dikonkretkan kontribusi hasil karyanya. Hasil karya dimaksud bagi kemajuan bangsa ini, tentu saja tidak terbatas pada lulusan dan ilmu pengetahuan-teknologi semata, tetapi karya produk dan jasa keahlian lainnya, termasuk rekomendasi berbasis bukti ilmiah (*evidence based*) dalam rangka formulasi kebijakan. Artinya, peran dan fungsi Unmul akan dirasakan oleh para pengguna (*users*), baik kalangan pemerintah, dunia usaha dan industri, berbagai organisasi/lembaga dalam dan luar negeri, dan tentu saja masyarakat



Gambar 1. Tridharma dan Fungsi Perguruan Tinggi

Menghadapi tantangan yang cukup berat tersebut Unmul dalam masa 60 tahun sejak kebangunannya yang dirintis oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur terus berbenah meningkatkan seluruh kapital yang dimiliki (manusia, fisik, alam, finansial, dan sosial) dengan rujukan visi dan misi jangka panjang menjadikan Unmul sebagai universitas bertaraf internasional (*world class university*) dalam kerangka pola ilmiah pokoknya “Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya”.

Terlebih dalam setengah dasawarsa terakhir ini ada sudut tuntutan lain yang harus diperhatikan selaras dengan keinginan untuk menjadikan Unmul menjadi “hebat”, yaitu orientasi Kaltim agar mampu berdaulat, sekaligus menguatkan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia di Kaltim (2022) yang diharapkan berfungsi mulai tahun 2024.

### **Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul**

Para pendiri dan pelopor Unmul sejak awal telah mempertimbangkan modal utama yang dapat digunakan sebagai keunggulan yang dapat dicapai Unmul dibandingkan dengan universitas lain dalam dan luar negeri (*comparative advantages*). Keunggulan paling tepat tentu bila mana dapat ditemukan kekhasan yang dimiliki hanya/atau paling tidak dominan oleh Unmul, dan hal tersebut menjadi penting karena akan digunakan sebagai Pola Ilmiah Pokok/PIP (*main scientific pattern*) dari pengembangan universitas sebagai pendidikan tinggi. Kekhasan asli yang paling sulit untuk bersaing adalah faktor alam (*natural capitals*) sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemikiran terkait kekhasan dimaksud jatuh pilihannya kepada ekosistem utama Kaltim di mana Unmul berada, yaitu wilayah hutan hujan tropis (*tropical rain forests*) atau juga dikenal sebagai hutan tropis lembap (*humid tropical forests*). Pada akhirnya, di awal tahun 80-an abad XX ditetapkan PIP Unmul, yaitu “Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya”.

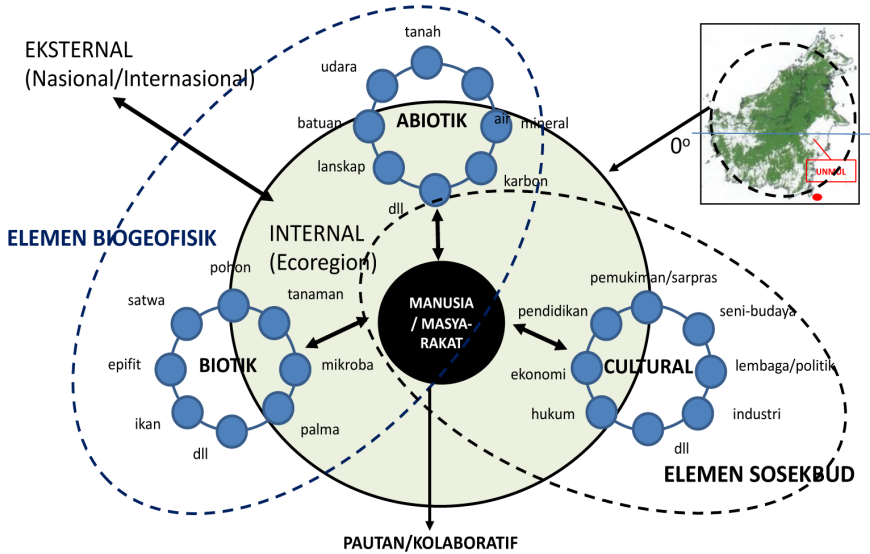
Memahami PIP Unmul haruslah secara utuh agar tidak terjebak pada kesalahan-kaprahan yang pernah terjadi, di mana mempersepsikan hutan hanya sebagai sumber daya (*resources*) yang menjadi bagian dari faktor produksi (*production factors*) sehingga posisi PIP sulit untuk dijadikan basis bagi pengembangan keilmuan Unmul secara keseluruhan fakultas atau hingga program studi.

Padahal sebagaimana pengertiannya, PIP adalah hal yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lain. Artinya, jika fokusnya pada universitas, seluruh fakultas atau bahkan prodi manapun yang bernaung di bawah universitas tersebut memberikan andil bagi terbentuknya jati diri yang dimaksud.

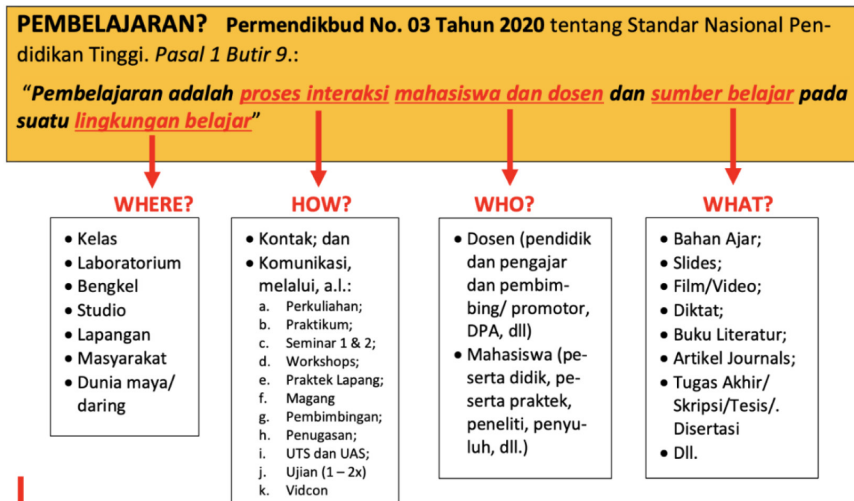
Sebagai suatu ekosistem, juga memiliki subsistem penyusunannya, baik yang bersifat hayati/hidup (*biotic sphere*; contoh elemennya: vegetasi/flora, satwa/fauna, hingga mikroorganisme) ataupun nonhayati/tidak hidup (*abiotic sphere*; contoh elemennya: tanah, air, karbon, dan seterusnya). Di samping keduanya, dalam konteks negara agraris yang sedang berkembang seperti Indonesia, unsur manusia/masyarakat beserta sosial-budaya yang dihasilkannya (*cultural sphere*; contoh elemen: ekonomi, pendidikan, politik, hukum, budaya, teknologi, kesehatan, dan lainnya).

Ekosistem tersebut selain memiliki struktur dan fungsi juga saling berinteraksi tidak saja antar-unsur pendukungnya (internal) akan tetapi juga dengan sistem lain yang berada di sekitarnya (eksternal) yang pada akhirnya membentuk sistem yang lebih besar baik pada skala regional atau pun global. Keseluruhannya dalam konteks interaksi tidak saja menghasilkan/mempertukarkan materi ataupun energi, tetapi juga informasi yang dapat dipelajari dan dikembangkan manusia selaku pengguna menjadi sumber ilmu pengetahuan bidang keahlian, tidak terkecuali di pendidikan tinggi.

Bagi Unmul ekosistem hutan tropis lembap adalah landasan pengembangan jati diri (PIP), serta dalam proses implementasinya merupakan sumber pembelajaran dari setiap bidang keahlian pada program studi yang ada, baik di fakultas maupun program pascasarjana. Bukan hanya unit kerja tersebut, bahkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta lembaga pengembangan pendidikan, juga organisasi kemahasiswaan dapat juga menggali dan memfokuskan program kegiatannya berbasiskan isu yang ada di ekosistem tersebut.



Gambar 2. Ekosistem Hutan Tropis Lembap sebagai Landasan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul (Sumber: Sardjono, 2018)



Gambar 3. Peta Pemaknaan Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi (Sumber: Masjaya et al., 2021)

Berbagai isu yang berkembang di hutan tropis lembap dan lingkungan sekitarnya menjadi objek pelaksanaan tugas Tridharma Unmul, tidak terkecuali dalam kerangka visi, misi, hingga sasaran program pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah daerah maupun oleh pusat.

### **Memaknai Kaltim Berdaulat dan IKN Kuat dari Perspektif Kampus**

PIP Unmul yang berlandaskan kekayaan (*richness*), keragaman (*diversity*), dan peran penting ekosistem hutan tropis lembap (mencakup berbagai sumber daya alam di dalamnya) bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat dan bahkan bangsa Indonesia selaras dengan cita-cita daerah (dicanangkan 2019) menuju Kaltim Berdaulat agar dapat mendukung Ibu Kota Negara Republik Indonesia Nusantara yang kuat.

Cita-cita atau dalam bahasa pembangunan sebagai visi Kaltim berdaulat didasarkan pada pertimbangan kelimpahan sumber daya di daerah ini yang telah memberikan kontribusi manfaat yang demikian besar pembangunan bangsa dan negara selama ini, namun justru dirasakan belum bisa mengoptimalkan manfaat yang diperoleh tersebut bagi rakyat dan daerah Kaltim sendiri. Cita-cita tersebut secara lebih konkret tercermin dari fokus lima misi pembangunan berbasis “kedaulatan” yang digariskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019/2023, yaitu (1) Sumber daya manusia; (2) Ekonomi dan kesejahteraan; (3) Konektivitas (transportasi dan komunikasi antarwilayah di dalam dan luar provinsi); (4) Lingkungan hidup; dan (5) Reformasi pendidikan.

Pencapaian cita-cita kedaulatan tersebut membutuhkan dukungan bidang keahlian yang keseluruhannya dapat diberikan oleh Unmul sebagai perguruan tinggi yang justru dibidani oleh daerah sendiri, melalui fakultas dan program studi yang ada.

Tabel 1. Misi Kaltim Berdaulat dan Dukungan Bidang Keahlian dari Fakultas dan Program Studi di Unmul

Misi Kaltim Berdaulat	Dukungan Unmul sesuai Bidang Keahlian	
	Fakultas	Jumlah Prodi
1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	▪ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	23
	▪ Fakultas Ilmu Budaya (FIB)	2
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	▪ Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	9
	▪ Fakultas Kedokteran (FK)	6
	▪ Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)	2
	▪ Fakultas Farmasi (FF)	4
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	▪ Fakultas Teknik (FT)	14
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	▪ Fakultas Pertanian (FAPERTA)	6
	▪ Fakultas Kehutanan (FAHUTAN)	3
	▪ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)	6
	▪ Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	7
	▪ Program Pascasarjana	2
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik	▪ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	8
	▪ Fakultas Hukum (FH)	2

Catatan: Dukungan per misi ini hanya untuk spesifikasi karena pada dasarnya seluruh fakultas dan prodi bisa mendukung lebih satu misi



## **Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:**

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

---

Nusantara (berasal dari Bahasa Sansekerta, dengan arti katanya: *nusa*= pulau; *antara*= luar atau seberang sehingga dimaknai sebagai negara kepulauan) terpilih sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Penetapannya telah melalui pertimbangan yang saksama. Pertama, secara faktual memang negara besar ini terdiri atas ribuan pulau (beserta ragam kondisi fisik dan sosial budayanya) yang dipisahkan dengan selat dan samudra yang luas. Kedua, memiliki akar kesejarahan yang kuat guna mempersatukan seluruh wilayah Indonesia saat ini sejak awal Abad XIV (Melalui Sumpah Palapa di Zaman Kerajaan Majapahit).

Pembangunan IK Nusantara tentu di samping kebutuhan agar dapat melaksanakan tata pemerintahan yang baik pada situasi dan kondisi sosial dan lingkungan yang mendukung, juga upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru tanpa terpusat pada Pulau Jawa semata, terlebih potensi sumber daya alam darat dan laut yang masih demikian melimpah di Indonesia bagian tengah dan timur. Untuk itu, IK Nusantara harus diperkuat, terutama dukungan berbasis bukti ilmiah guna perumusan berbagai kebijakan pembangunan. Dari perspektif ini, Unmul sebagai perguruan tinggi negeri tertua dan terdekat, serta kelengkapan bidang keahlian yang dimiliki seharusnya berada di lini terdepan.

### **Klasterisasi Pemikiran Akademisi dalam Mendukung Pembangunan**

Isu dan sekaligus tantangan dihadapi guna merealisasikan visi Kaltim dan dukungan bagi terwujudnya IKN yang kuat memang sangat kompleks seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang senantiasa dan bahkan di mana saja justru berlangsung mendahului lebih cepat dan berdampak perubahan wajah alam, serta lingkungan kita.

Terlebih lingkungan hutan tropis lembap termasuk yang berada di Kaltim juga merupakan ekosistem yang kompleks, serta cenderung rentan terhadap setiap bentuk perubahan. Padahal, sejatinya pembangunan adalah perubahan keseimbangan guna meningkatkan arus manfaat kepada manusia (baca masyarakat) (Soemarwoto, 1985). Ada bagian dari elemen sumberdaya alam di dalamnya yang bersifat dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan juga yang

tidak dapat (*non-renewable reources*). Meskipun dalam rangka peningkatan arus manfaat ekosistem hutan tropis lembap dan lingkungannya sebagai modal (*capital*) utama tetap harus didayagunakan, sedangkan implikasi negatif yang mungkin harus dimitigasi seefektif dan seefisien mungkin yang dalam hal ini digantungkan kepada peran ilmuwan dan akademisi perguruan tinggi, termasuk melalui produk pemikiran yang tertuang dalam buku yang tersaji ini.

Guna mempermudah dan memfokuskan pemikiran, maka berbagai isu yang dihadapi (Catatan: hanya berupa contoh, tentu masih bisa dijabarkan lebih luas lagi) perlu untuk diklasterisasi berbasis pada relevansi inti permasalahannya sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Klasterisasi Isu-isu di Ekosistem Hutan Tropis Lembap dalam Mendukung Kontribusi Pemikiran Akademisi/Peneliti

Isu Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik, dan Lingkungan (Contoh)	Klasterisasi Pemikiran	Jumlah Artikel
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dualisme kepemimpinan berbasis atas hukum negara dan hukum adat</li> <li>▪ Konflik tata batas, <i>tenurial</i>, dan penguasaan sumber daya alam</li> </ul>	1. Bidang Kebijakan dan Sosial Politik	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perluasan penyakit tropis dan kesehatan lingkungan yang rendah</li> <li>▪ Hambatan geografis dalam pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman</li> </ul>	2. Bidang Kesehatan dan Kefarmasian	10
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusutan energi fosil dan energi tidak terbarukan</li> <li>▪ Tanah asam bagi optimalisasi produksi pangan</li> </ul>	3. Bidang Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan dan Lahan	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Degradasi keanekaragaman hayati <i>incl.</i> jenis endemik</li> <li>▪ Perluasan limbah dan dampak industrialisasi</li> </ul>	4. Bidang Lingkungan dan Implikasinya	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan kapital manusia di daerah 3T</li> <li>▪ Ancaman kepunahan kekayaan seni budaya tradisional</li> </ul>	5. Bidang Pendidikan dan Budaya	10
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebutuhan untuk mengembangkan investasi hijau</li> <li>▪ Kemiskinan masyarakat lokal dan ketergantungan pada sumberdaya alam</li> </ul>	6. Bidang Potensi Investasi dan Kebijakan Perekonomian	14

Sekali lagi isu-isu tersebut hanyalah contoh yang tentunya masih banyak lagi, terutama dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara maka isu-isu seperti terkumpul di dalam wilayah dan lokasi sekitarnya. Isu dimaksud tidak terbatas tentunya kepada permasalahan lingkungan saja, tetapi juga kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya.

### **Catatan Penutup: Memanfaatkan Hasil Pemikiran Akademisi Unmul**

Pemikiran yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kaltim (tentu tidak terbatas di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota yang ada) dan pemerintah pusat sebagai suatu kajian akademik. Kajian akademik sering kali dikatakan terlalu teoritik alias tidak aplikatif, tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam penyusunan peraturan perundangan pun juga dibutuhkan adanya naskah akademik, yaitu hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, naskah akademik dapat dikatakan sebagai landasan yang bersifat akademis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentu saja pemerintah. Setidaknya dengan adanya naskah akademik, permasalahan di kemudian hari dapat dihindarkan dan/atau diargumentasikan dari berbagai sisi filosofis, sosiologis, mau pun yuridis.

60 kajian akademik yang ditulis lebih dari 60 orang akademisi Unmul dalam buku memperingati Dies Natalis Unmul ke-60 tahun pada Bab II hingga Bab VII (enam klaster) ini memang tidak bisa mutlak diidentikkan dengan naskah akademik karena dalam penulisan topik beragam sesuai bidang keahlian penulis/peneliti masing-masing dan tidak memenuhi kaidah penulisannya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karenanya hasil pemikiran akademisi Unmul ini paling tidak dapat menginspirasi inisiatif dan/atau strategi yang dapat dijalankan oleh para pengguna atau pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah Kaltim dan Pengelola/Badan Otorita IKN dalam rangka menuju Kaltim Berdaulat serta IKN yang kuat.

Oleh karenanya, guna merangkum hasil-hasil penting dari pemikiran berbasis penelitian dan kajian akademisi Unmul, dalam Bab VII disampaikan rekomendasi penting dan konkret, serta dalam bahasa yang lugas dan diharapkan dapat ditindaklanjuti.

## **REFERENSI**

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **Pustaka**

Masjaya, MA Sardjono, UW Sagena, A Rahmadi. 2021. Para Pembelajar Merdeka di Era Disrupsi: Sebuah Urun Rembuk dari Kalimantan Timur sebagai Calon Ibukota Negara Baru. Samarinda: LP2M Unmul.

Sardjono MA. 2018. PIP Unmul. Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman. Materi presentasi dipersiapkan untuk berbagai acara di lingkungan Unmul. Samarinda: Unmul.

Soemarwoto O. 1985. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.



## DAFTAR ISI

### PENGANTAR:

Unmul sebagai Pilar Penting dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kaltim Guna Memperkuat Nusantara <i>Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.</i> .....	v
--	---

### EDITORIAL:

Perspektif Akademik Mewujudkan Kaltim Berdaulat dan IKN yang Kuat <i>Mustofa Agung Sardjono, Lambang Subagiyo, Anton Rahmadi</i> .....	ix
---	----

DAFTAR ISI.....	xxi
-----------------	-----

### **KEBIJAKAN DAN SOSIAL POLITIK..... 1**

REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS MULAWARMAN MENYONGSONG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA <i>Abdunnur, Hamdi Mayulu</i> .....	3
--	---

<i>SENSE OF BELONGING</i> MASYARAKAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA BARU <i>Silviana Purwanti, Netty Dyan Prastika</i> .....	13
---	----

SEKURITISASI IDENTITAS KOMUNITAS MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH IKN <i>Sonny Sudiar, Rahmah Daniah</i> .....	29
---	----

PENGUATAN TATA LAKSANA DAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <i>Daryono, Fajar Apriani, Kus Indarto</i> .....	43
---	----

DAYA DUKUNG POLITIK LOKAL KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMBANGUN IKN: DEMOKRASI, KEBERAGAMAN, DAN KESADARAN POLITIK <i>I Ketut Gunawan, Muhammad Noor, Mohammad Taufik</i> .....	65
---	----

**Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:**

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

---

DAMPAK SOSIAL-BUDAYA RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, IDENTIFIKASI DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA <i>Harihanto</i> .....	87
KONSTRUKSI HUKUM IBU KOTA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA <i>Alfian</i> .....	101
IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL <i>Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty, Grizelda</i> .....	113
<b>KESEHATAN DAN KEFARMASIAN</b> .....	131
POTENSI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM PEMENUHAN DAN PEMERATAAN DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS ANTISIPASI KEBERADAAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DI KALIMANTAN TIMUR <i>Rahmat Bakhtiar, Ika Fikriah, Siti Khotimah, Sulistiawati, Moriko Pratiningrum, Fritz Nahusuly</i> .....	133
OPTIMALISASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BERBASIS KEPERAWATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI IBUKOTA NEGARA “NUSANTARA” DI KALIMANTAN TIMUR <i>Ruminem, Dwi Nopriyanto, Rita Puspa Sari, Bahtiar, Muhammad Aminuddin</i> .....	147
KESEHATAN GIZI MASYARAKAT DI IBU KOTA NUSANTARA: SITUASI TERKINI BALITA <i>STUNTING</i> , <i>UNDERWEIGHT</i> , <i>WASTING</i> , GIZI LEBIH DAN GEMUK DI KALIMANTAN TIMUR <i>Meiliati Aminyoto, Evi Fitriany, Riries Choiru Pramulia Yudia, Krispinus Duma, Muhammad Khairul Nuryanto, Ronny Isnwardana, Swandari Paramita</i> .....	175

DETERMINAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI MASYARAKAT DI IKN NUSANTARA <i>Nisa Muthi'ah, Cicih Bhakti Purnamasari, Cristiani Nadya Pramasari, Nydia Hanan, Dewi Arsih Sulistiani, Imran Irsal</i> .....	187
PANGAN LOKAL HUTAN TROPIS LEMBAP DALAM PENCEGAHAN STUNTING <i>Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, Nurul Afiah, Reny Noviaty</i> .....	203
PERAN KADER POSYANDU SEBAGAI GARDA DEPAN DALAM MENCIPTAKAN RUMAH BEBAS ASAP ROKOK SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT DI WILAYAH PENUNJANG IKN <i>Nur Rohmah, Riza Hayati Ifroh, Annisa Nurrahmawati, Lies Permana, Rina Tri Agustini</i> .....	219
ANALISA POTENSI PEMANFAATAN TANAH LIAT KAMPUNG KUTAI LAMA DALAM REDUKSI MIKROBA PATOGEN PADA LIMBAH CAIR DOMESTIK <i>Blego Sedionoto, Vivi Vilia Elvira, Sitti Badrah</i> .....	237
SURVEI KEPUASAN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PENYANGGA IKN <i>Ratno Adrianto, Iwan M. Ramdan, Reny Noviasty, Rahmi Susanti, Chaerunnisa AR, Dewi Yuniar</i> .....	249
POTENSI BIODIVERSITAS TUMBUHAN KALIMANTAN TIMUR UNTUK Mendukung Kemandirian Bahan Baku Obat Herbal dalam Negeri <i>Islamudin Ahmad</i> .....	259
POTENSI NUTRASETIKAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR <i>Yurika Sastyarina, Ummi Khuzaimah, Helmi, Dwi Elfira Kurniati</i> .....	275



**Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:**

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

---

EKSTRAK MANGROVE UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HATCHERY <i>Gina Saptiani</i> .....	291
<b>KETAHANAN ENERGI, KETAHANAN PANGAN DAN LAHAN ....</b>	<b>311</b>
MEMBANGUN PENYANGGA PANGAN KALTIM DAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) <i>Bernatal Saragih</i> .....	313
STATUS MIKROBIA DAN KESUBURAN TANAH PADA LAHAN PASCA TAMBANG BATU BARA MENUJU PENGELOLAAN LAHAN YANG BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI PT. ALAM JAYA PRATAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) <i>Sopialena</i> .....	327
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA LAHAN AREAL REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR <i>Mulyadi</i> .....	343
STRATEGI PEMANFAATAN DAN NILAI TAMBAH DARI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) UNTUK MENDUKUNG IKN YANG KUAT <i>Irawan Wijaya Kusuma, Harlinda Kuspradini, Enos Tangke Arung, Enih Rosamah, Agmi Sinta Putri</i> .....	355
PERAN STRATEGIS SEKTOR KEHUTANAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN ENERGI DI KALIMANTAN TIMUR: PERCEPATAN PENYEDIAAN LISTRIK DESA DI WILAYAH PEDALAMAN ( <i>REMOTE AREA</i> ) <i>Rudianto Amirta, Wiwin Suwinarti, Yuliansyah, Muhammad Taufiq Haqiqi, Dwi Susanto, dan Retno Wulandari</i> .....	391

ANALISIS DAYA DUKUNG TANAH DAN BATUAN, KONDISI GEOHIDROLOGI SERTA POTENSI KEBENCANAAN WILAYAH IBU KOTA NEGARA “NUSANTARA” DARI SUDUT PANDANG GEOLOGI <i>M. Dahlan Balfas, M. Amin Syam, Koeshadi Sasmito, Diana Rahmawati</i> .....	415
MEWUJUDKAN SWASEMBADA ENERGI DAERAH MELALUI PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DALAM MENINGKATKAN DAYA DUKUNG IKN NUSANTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR <i>Dadan Hamdani, A. Inu Natalisanto, Suhadi Mulyono, Rahmawati M</i> .....	433
MENUJU KETAHANAN ENERGI INDONESIA DI MASA DEPAN <i>Anton Rahmadi</i> .....	451
PERTANIAN ENERGI SEBAGAI SEBUAH BASIS EKONOMI PASCA TAMBANG <i>Anton Rahmadi dan Yazid Ismi Intara</i> .....	473
KONTRIBUTOR .....	503





KEBIJAKAN  
DAN SOSIAL POLITIK



# REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS MULAWARMAN MENYONGSONG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Abdunnur<sup>1</sup>, Hamdi Mayulu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Science, Mulawarman University, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia

<sup>2</sup>Institution for Educational Development and Quality Assurance, Mulawarman University Rectorate Building 3rd Floor, Kuaro Street 1068, East Kalimantan, Indonesia

*Correspondent Author:* [abdunnur@fpik.unmul.ac.id](mailto:abdunnur@fpik.unmul.ac.id)

## ABSTRAK

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul untuk melaksanakan segala jenis pelayanan secara mandiri, dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau perguruan tinggi. Perubahan khususnya menyangkut area kelembagaan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja. Program reformasi birokrasi dan zona integritas dibutuhkan Unmul dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) yang dapat menunjang pembangunan IKN.

**Kata kunci:** Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Perguruan Tinggi, IKN

## PENDAHULUAN

Perwujudan praktik tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi (*good university governance*) membutuhkan suatu pembaharuan dan perubahan mendasar di antaranya melalui pelaksanaan program-program reformasi birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih (bebas korupsi, kolusi, nepotisme), akuntabel, profesional, produktif, efektif dan efisien, pelayanan publik berkualitas (layanan prima) (Purwanto, 2020; Sunarno dan Solihin, 2017), serta memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi. *Monitoring* dan evaluasi dalam tata laksana proses reformasi birokrasi dapat menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) sehingga penerapan reformasi birokrasi dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menekan perilaku korupsi (Sangka *et al.*, 2020).

Perguruan tinggi merupakan “institusi publik” yang memiliki tugas untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi (Sangka *et al.*, 2020). Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi sesuai amanat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di antaranya bertujuan untuk membangun Zona Integritas dan WBK/ WBBM pada satuan kerja dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi memiliki relevansi signifikan dengan pembangunan sebuah negara (Arifin, 2022). Reformasi birokrasi yang diterapkan di Unmul diharapkan dapat menunjang pendidikan yang bermutu karena prinsipnya pendidikan bermutu menjadi modal pembangunan manusia suatu bangsa (Arifin, 2022) termasuk dalam menunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).

## PEMBAHASAN

### **Kebijakan Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi**

Reformasi birokrasi secara umum merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif) (Yuliatwati dan Prasetyo, 2018; Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019). Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024; dan
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Kemen PPPA, 2020).

Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi menjadi suatu keharusan, mengingat perguruan tinggi merupakan bagian dari sektor publik (Sangka *et al.*, 2020) yang masih banyak mengalami permasalahan terkait dengan birokrasi, di antaranya:

1. Organisasi di sebagian besar perguruan tinggi relatif besar;
2. Proporsi dosen yang menjabat struktural di perguruan tinggi relatif besar;
3. Proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) non-akademik relatif besar (di 44% perguruan tinggi);
4. Inefisiensi, produktivitas, dan kualitas cenderung rendah; dan
5. *Resource sharing* yang kurang dalam artian penggunaan sarana bersama belum optimal (Kemenristek Dikti, 2017).

Sasaran utama reformasi birokrasi meliputi: 1) birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja; 2) birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik baik serta berkualitas (Labolo dan Indaryani, 2017; Anam *et al.*, 2020). Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi dilakukan untuk merevitalisasi perguruan tinggi dan menempatkannya pada persaingan global sehingga membutuhkan sistem yang secara terintegrasi mampu mengarahkan sumber daya nasional untuk dapat berperan aktif pada situasi global (Buntari, 2017).

### **Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman**

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi yang telah memiliki status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul untuk melaksanakan segala jenis pelayanan secara mandiri mulai dari



mahasiswa, dosen, sampai tenaga kependidikan (pegawai) dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui reformasi birokrasi. Praktik baik perwujudan *good university governance* (GUG) yang ditunjukkan dengan tata kelola yang menganut asas kredibilitas, transparansi akuntabilitas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Indikator keberhasilan tata kelola Unmul pada tahun 2021 telah memperoleh akreditasi A berdasarkan SK BAN-PT Nomor:1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017, tanggal 23 Mei 2017, dan telah diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 273/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, sampai dengan 24 Mei 2027. Pencapaian peringkat akreditasi “unggul” oleh Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 3591/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kehutanan pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, sampai dengan 14 Juni tahun 2027. Universitas Mulawarman telah memperoleh pencapaian prestasi peringkat ke-14 dari 34 PTN BLU, pada Liga PTN BLU tahun 2022 (Surat Ditjen Dikti Ristek Nomor:1706/E1/DI.04.02/2022 tentang Hasil Evaluasi IKU tahun 2021) (LP3M, 2022). Program reformasi birokrasi di Unmul mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* reformasi birokrasi 2015–2019, serta secara teknis berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 sampai dengan 15 Tahun 2011.

Reformasi Birokrasi Unmul diawali pada tahun 2017, dimulai dengan penyusunan tonggak-tonggak reformasi birokrasi tahun 2017–2025 dan penyusunan tim reformasi birokrasi (tahun 2017) yang meliputi delapan area, yaitu 1) Manajemen perubahan; 2) Penguatan pengawasan; 3) Penguatan akuntabilitas kinerja; 4) Penguatan organisasi dan/atau kelembagaan; 5) Penataan tata laksana; 6) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; 7) Penataan peraturan perundang-undangan; dan 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Universitas Mulawarman dalam rangka merencanakan dan mengimplementasikan reformasi birokrasi didukung oleh tim reformasi birokrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 777/KP/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Mulawarman. Tim Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan *road map* pada setiap area dan *quick wins*, merancang rencana manajemen perubahan, mendampingi pelaksanaan *quick wins*, memelihara area yang telah maju, *me-monitoring* dan mengevaluasi secara berkala, dan sebagai *agent of change*. Tim Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman telah melakukan progres yang telah ditentukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian di antaranya:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan melibatkan dari berbagai Satuan Unit Kerja yang terkait dan saling bersinergi, baik di tingkat fakultas maupun universitas.
3. Penyusunan Peta Proses Bisnis  
Penyusunan Peta Proses Bisnis Unmul dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur setiap unit kerja.
4. Bizagi  
Bizagi merupakan aplikasi yang mengemas SOP dalam sebuah *room* besar yang di dalamnya terdapat *room* kecil (berisi SOP unit kerja yang saling beririsan antara satu unit dan unit yang lain);
5. Unit Layanan Terpadu  
Unit Layanan Terpadu (ULT) Unmul merupakan representasi dari reformasi birokrasi dan terlaksananya zona integritas, serta termasuk program percepatan (*quick wins*) dalam reformasi birokrasi.
6. Penentuan Fakultas Teknik sebagai Zona Integritas (ZI)  
Program reformasi birokrasi Unmul merupakan program terlembaga dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, efektif, efisien, bersih, berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa diskriminasi dan nilai profesional. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Unmul bersinergi dengan tujuan Unmul, yaitu: 1) memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien;

serta 2) memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Unmul (*good university governance*).

### **Relevansi Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman terhadap Pembangunan IKN**

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, serta kinestetik dalam rangka mempersiapkan pemimpin bangsa di berbagai sektor kehidupan. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi, khususnya menyangkut area kelembagaan, sumber daya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja pegawai. Birokrasi memiliki peran penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara karena berperan menopang pelaksanaan fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi. Birokrasi pada negara modern kehadirannya diperlukan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam memberikan layanan terbaik (Alfiandri, 2012), cepat, tepat, dan profesional kepada publik (Anam *et al.*, 2020). Birokrasi digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisah yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal (Yusriadi, 2018).

Reformasi birokrasi termasuk langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan, serta pembangunan nasional (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, transparan, bersih, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar, serta kode etik aparatur negara untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi prioritas menuju pemerintahan kelas dunia. Pencapaian sasaran-

sasaran reformasi birokrasi secara bertahap di Unmul diharapkan mampu menghasilkan *governance* yang berkualitas. Kualitas *governance* yang semakin baik akan menghasilkan pembangunan (*development outcomes*) semakin baik pula. *Governance* yang berkualitas ditandai dengan 1) tidak ada korupsi; 2) tidak ada pelanggaran; 3) APBN dan APBD baik; 4) program terselesaikan dengan baik; 5) perizinan seluruhnya selesai dengan cepat dan tepat; 6) komunikasi dengan publik baik; 7) waktu (jam kerja) efektif dan produktif; 8) menerapkan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan 9) hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, pralapanangan kerja, dan propengurangan kemiskinan) (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019).

Reformasi birokrasi dalam suatu negara diarahkan pada proses transformasi *mindset* dan *culture set* pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Yusriadi, 2018). Birokrasi pada pembangunan IKN dapat berperan sebagai instrumen dalam masyarakat dan sebuah konsekuensi logis bahwa negara memiliki misi untuk menyejahterakan masyarakat (Yusriadi, 2018). Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel (Yusriadi, 2018). Orientasi pelayanan publik kepada masyarakat tidak hanya berperan untuk peningkatan kinerja birokrasi, tetapi juga menjadi unsur strategis dalam mengembangkan pelayanan birokrasi pemerintah di masa depan (Yasa *et al.*, 2021). Penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi harus sejalan dengan prinsip anti korupsi agar tertanam jiwa berintegritas (Huberts, 2018; Sangka *et al.*, 2020). Praktik korupsi, khususnya di perguruan tinggi memberikan dampak negatif terhadap tata kelola dan sumberdaya manusia di suatu negara, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya daya saing perguruan tinggi, serta terkikisnya nilai-nilai kebangsaan dalam budaya korupsi lintas generasi (Salahudin *et al.*, 2019).

## KESIMPULAN

Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi, khususnya menyangkut area kelembagaan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja. Program reformasi birokrasi dan zona integritas dibutuhkan Unmul dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) yang dapat menunjang pembangunan IKN. Upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi dan zona integritas membutuhkan:

1. Optimalisasi peran tim reformasi birokrasi (di delapan area) di tingkat universitas dan zona integritas di tingkat fakultas dan/atau lembaga;
2. Sinkronisasi semua sistem reformasi birokrasi di delapan area dengan zona integritas melalui digitalisasi; dan
3. Pengembalian fungsi unit layanan terpadu sebagai bagian dari representasi reformasi birokrasi dan zona integritas.

## REFERENSI

- Alfiandri. 2012. Reformasi birokrasi di era otonomi daerah. *SOSIO-RELIGIA* 10(1): 179–200.
- Anam K, Suryadi, Hermawan. 2020. Implementation of integrity zone development in strengthening the quality of public services in the conservation center of Pur wodadi Garden Plantation - Indonesian Science Institution. *WACANA*. 23(2): 142–149.
- Arifin M. 2022. Permasalahan dalam reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 16(3): 1049–1064. DOI: <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.981>.
- Buntari. 2017. (Re) Formasi birokrasi: profesionalisme birokrat pada level perguruan tinggi. *DIMENSI*. 10(1): 5–13.
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 2019. Buku saku reformasi birokrasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Huberts LWJC. 2018. Integrity: what it is and why it is important. *Public Integrity*. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>

- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). 2017. Reformasi birokrasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Ringkasan kegiatan reformasi birokrasi internal tahun 2010. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 2020. Buku panduan tim reformasi birokrasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Download pada tanggal 14 Juli 2022. Tersedia: <https://s.id/1h1Z8>
- Labolo M, E Indaryani. 2017. Bureaucratic reform and the challenge of good governance implementation in Indonesia. *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*. 2(4): 26–47. DOI: <http://dx.doi.org/10.222.99/arpap/2017.26>
- Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M). 2022. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi. Universitas Mulawarman.
- Purwanto R. 2020. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2020-2024. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*. 1(21): 84–103.
- Sangka KB, AN Probohudono, OH Nurcahyono. 2020. Optimalisasi program reformasi birokrasi perguruan tinggi menggunakan AHP dan BSC. *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*. 4(2): 167–170. DOI: <https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.365>
- Salahudin, A Nurmandi, M Fajar, D Mutiarin, B Siregar, T Sulistyaningsih, Jainuri, R Agusta, K Karinda. 2019. Developing integrity university governance model in Indonesia. *International Journal of Higher Education*. 8(5): 185–199. DOI: <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p185>
- Sunarno, Solihin. 2017. Analisis reformasi birokrasi dalam perspektif transformasional kinerja dosen di sekolah tinggi penerbangan Indonesia curug tangerang. *Jurnal Ilmiah Aviasi Langit Biru*. 10(2): 1–8.

**Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:**

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

---

- Yulawati E, K Prasetyo. 2018. Bureaucracy reform implementation of legislative institutions in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 219: 186–202.
- Yusriadi. 2018. Indonesian bureaucratic reform: opportunities and obstacles. *Public Administration Journal*. 8(2): 178–185. DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>